

Kisruh PBNU Gus Yahya Tolak Mundur

Kumpulkan Ulama Tanpa Rais Aam

Jakarta, MIMBAR - Risalah rapat harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) minta Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengundurkan diri dari jabatannya. Gus Yahya menegaskan tak akan mundur.

"Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur (dari Ketum PBNU). Karena saya mendapatkan amanah dari muktamar untuk lima tahun, pada muktamar ke-34 lalu," kata Gus Yahya di Surabaya, Minggu (23/11/2025) dini hari, dilansir detikJatim.

■ Bersambung ke Hal 7

Cak Imin Buka Suara

KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammadi Iskandar alias Cak Imin menanggapi soal Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya didesak mundur dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dia meminta semua pihak menunggu proses di internal PBNU yang sedang berjalan. Sebab, PKB juga akan menunggu proses internal tersebut.

"Kita tunggu saja, kita tunggu saja, biarkan proses internal mereka berlangsung," ujar Cak Imin, Ahad (23/11).

Cak Imin pun berharap polemik tersebut dapat segera diselesaikan

■ Bersambung ke Hal 7



Sikap Pengurus Wilayah

Jakarta, MIMBAR - Sejumlah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU di berbagai daerah telah bersikap merespons risalah rapat harian Syuriah PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatan ketua umum.

Ada yang mendukung, ada pula yang menerima apa pun hasil keputusan pemegang wewenang.

DUKUNG

Salah satu pengurus wilayah yang mendukung yaitu PWNU Kalimantan Selatan.

Ketua PWNU Kalsel Muhammad Tambrin mengatakan kelompoknya mendengar dan menaati keputusan yang dikeluarkan oleh Rais



Hidayah Prabowo dan Poros Baru Melayu-Islam

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membuka fase baru bagi politik luar negeri Indonesia. Di tengah turbulensi global rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, meningkatnya krisis keamanan di Timur Tengah, serta perubahan dinamika Indo-Pasifik Indonesia berada di posisi unik sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar sekaligus kekuatan utama Asia Tenggara. Dalam konteks ini, Prabowo menawarkan gagasan strategis yang semakin menonjol, yakni pembentukan poros baru Melayu-

■ Bersambung ke Hal 11



Kredit yang Tak Menyentuh Tanah

Oleh: Ngatirin

Bank daerah seharusnya punya kaki yang menapak kuat di tanah tempat ia lahir. Ia harus merasakan de-nut pasar, suara pedagang, dan napas pelaku usaha kecil. Namun kredit Bank Sumut belakangan terasa seperti berjalan di udara. Tinggi, jauh, dan rapuh menyentuh bumi.

Di rapat pemegang saham, angka-angka kredit terlihat indah. Pertumbuhan kredit tercatat agresif. Keketulitas diklaim membaik. NPL diturunkan menjadi angka yang tampak aman di mata pengawas. Tapi di lapangan, cerita berbeda. Di pasar-pasar kecil, nama Bank Sumut jarang terdengar. Di kios-kios UMKM, formulir kredit terlihat lebih menyerupai tembok dari pada pintu masuk.

Pedagang kecil hanya butuh lima belas hingga dua puluh juta rupiah. Tapi prosedur yang ditemui seolah menghadapi kredit miliaran. Mereka diarahkan membuat laporan yang tak pernah mereka kenal. Mereka diminta jaminan yang tak mereka punya. Pada akhirnya, kredit mikro hanya menjadi slogan yang disisipkan dalam materi rapat, bukan kenyataan yang hidup di pasar.

Yang sering terjadi justru sebaliknya. Kredit berskala menengah ke atas mengalir lebih lancar. Proyek-proyek yang menyentuh jaringan pejabat lokal lebih cepat diproses. Risiko lebih besar, tapi

■ Bersambung ke Hal 7

Penjelasan Syuriyah

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengeluarkan surat tabayun terkait beredarnya dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah yang memuat keputusan meminta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur. Surat bernomor 4778/

■ Bersambung ke Hal 7



Pembangunan Kampus V UIN Sumut Disoal Disinyalir 'Serobot' Jalan Umum

Deliserdang, MIMBAR - Pembangunan pagar tembok Kampus V UINSU (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) yang terletak di Jalan Balai Desa Sena, Dusun V, Kecamatan Batang Kuis, Deliserdang, dituding telah menyala-hi aturan karena diduga menyerobot jalan umum.

Informasi yang dihimpun Mimbar Umum, proyek yang menelan anggaran Rp28,1 miliar tersebut dikerjakan oleh PT Daffa Buana Sakti.

Seharusnya, pagar tembok kam-

■ Bersambung ke Hal 7

Soal Dugaan Korupsi Haji di Kemenag dan BPKH

KPK: Miris

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan penyelidikan dugaan korupsi layanan pendukung haji di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berawal dari laporan pengaduan masyarakat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saat ini pihaknya tengah menelah dan menganalisis laporan untuk fokus mencari dugaan peristiwa pidananya.

Di sisi lain, dia mengatakan adanya laporan dugaan korupsi dimaksud memperlihatkan kondisi yang miris. Sebab, pada saat bersamaan KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan untuk pelaksanaan tahun 2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

"Tentu ini juga menjadi sesuatu yang miris ketika saat ini KPK juga sedang

■ Bersambung ke Hal 7



■ Melawan dia ...

■ He..he..he..